

KAPITALISME SEMU DAN BISNIS MILITER MASA ORDE BARU

Cornelius Bayu Astana¹

¹ Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Email: ¹corneliusastana21@gmail.com

Abstract. *This study uses a historical method with a literature study model by studying old books and publications about the military business and pseudo-capitalism that developed in Indonesia as a result. The military business that occurred in Indonesia was caused by the implementation of ABRI's dual function during the New Order era. ABRI's dual function allowed members of the military to hold civilian positions in the government. The freedom of access to public positions and policies as well as the strength of the troops owned allowed the Indonesian military to build its business. This fact is also supported by the lack of law enforcement so that abuse of authority often occurs. The cooperation between the military and businessmen close to the Cendana family has made Indonesia enter a pattern of capitalism. However, the capitalism that grew was pseudo-capitalism because it did not grow organically from the free market system. As a result, the economy did not pull Indonesia forward and easily collapsed with the financial crisis.*

Keyword: Ersatz-Capitalism; New Order; ABRI Dwifungsi

Abstrak. *Kajian ini menggunakan metode historis dengan model studi pustaka dengan mempelajari buku dan terbitan lama mengenai bisnis militer dan kapitalisme semu yang berkembang di Indonesia sebagai dampaknya. Bisnis militer yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh penerapan dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru. Dwifungsi ABRI memberikan anggota militer untuk dapat menduduki jabatan-jabatan sipil di pemerintahan. Keleluasaan akses pada jabatan dan kebijakan publik serta kekuatan pasukan yang dimiliki membuat militer Indonesia dapat membangun bisnisnya. Fakta tersebut juga didukung dengan penegakan hukum yang kurang berjalan sehingga kerap terjadi penyalahgunaan wewenang. Kerjasama antara pihak militer dan pengusaha yang dekat dengan keluarga Cendana membuat Indonesia memasuki pola kapitalisme. Namun demikian kapitalisme yang tumbuh adalah kapitalisme semu karena tidak tumbuh secara organik dari sistem pasar bebas. Akibatnya jalannya perekonomian tidak menarik Indonesia pada kemajuan dan mudah tumbang dengan adanya krisis keuangan.*

Kata Kunci: Kapitalisme Semu; Orde Baru; Dwifungsi ABRI



Copyright © 2023 The Author(s)
This is an open-access article under the CC BY-SA license.
[Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Institusi Polri pada tahun 2022 lalu sempat menjadi sorotan dan masuk dalam pemberitaan nasional. Selain disorot karena kasus pembunuhan Brigadir Yushua ternyata oknum polri juga melakukan pelanggaran hukum dengan terlibat bisnis gelap. Bisnis gelap pertama adalah judi online konsorsium 303 yang diduga melibatkan Irjen Ferdy Sambo. Sementara bisnis gelap kedua adalah mengenai penjualan barang bukti narkoba yang melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa. Pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Polri bahkan menyeret anggota bintang dua tersebut membuka mata publik bahwa aparat bersenjata memanfaatkan jabatan dan kewenangannya untuk menjalankan bisnis. Kekhawatiran akan maraknya praktik tidak baik yang dilakukan oleh aparat bersenjata bertambah ketika disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pada Bab V Pasal 19 ayat 2 menyatakan bahwa jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: (a) prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan (b) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dapat dikatakan bahwa undang-undang ini menghidupkan kembali sistem Dwifungsi ABRI yang pernah dipraktikkan pada masa Orde Baru. Praktik Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru ini dianggap sebagai salah satu faktor yang menyuburkan bisnis yang dilakukan aparat bersenjata.

Bisnis yang dioperasikan oleh aparat bersenjata pada masa Orde Baru dilakukan secara terang-benderang di hadapan publik ketika dipraktikannya Dwifungsi ABRI. Dwifungsi ABRI pada mulanya dicetuskan konsepnya oleh Jenderal A.H. Nasution, namun pelaksanaannya menyimpang ke arah yang destruktif ketika Orde Baru (Aning, 2005). Apa yang diharapkan oleh Jenderal A.H. Nasution melalui dwifungsi ABRI yang adalah keberpihakan tentara pada rakyat justru menjadi penekanan dan pengekanan terhadap mereka. Dalam konsep Dwifungsi ABRI sedianya tentara juga berperan dalam pembangunan di luar bidang pertahanan dan keamanan (Muhaimin, 1997). Misalnya dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan. Angkatan Darat dilibatkan secara aktif sebagai pemeran utama usaha menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang menjadi bagian program pemerintah dalam memperbaiki masalah ekonomi (Aman, 2015). Menariknya pada masa Orde Lama - dan nantinya juga Orde Baru - alokasi anggaran untuk ABRI terbilang rendah. Situasi ini memaksa ABRI untuk mengupayakan mencari dana mereka sendiri. ABRI menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis di luar tugas pokoknya dalam bentuk penyelundupan, pungutan liar, kerjasama dengan pengusaha, dan mengelola perusahaan atau BUMN.

Apa yang kemudian dikenal sebagai bisnis militer ini selanjutnya menjadi salah satu penyokong kapitalisme yang dibangun Pemerintah Orde Baru. Kapitalisme sendiri dapat diartikan sebagai suatu pandangan mengenai ekonomi dimana setiap individu bebas dan berhak menjalankan kegiatan ekonomi hingga mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kapitalisme memiliki tiga unsur penting yakni pemanfaatan dan pemilikan pribadi, pembagian kerja dan spesialisasi, serta perdagangan besar dan persaingan (Vaut, 2014). Kapitalisme memberi masyarakat kebebasan sekaligus insentif untuk mencipta, memproduksi dan menjual barang, sehingga menciptakan kemakmuran (Norberg, 2011). Namun menurut Yoshihara Kunio (1990) kapitalisme seperti ini tidak terjadi di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Menurutnya kapitalisme yang terjadi di Indonesia merupakan kapitalisme semu. Militer dengan bisnis-bisnisnya menjadi salah satu unsur yang membuat kapitalisme di Indonesia dianggap tidak tulen.

Pertanyaan yang mengemuka kemudian adalah mengapa kapitalisme pada masa Orde Baru disebut kapitalisme semu? Selanjutnya bagaimana bisnis militer pada masa Orde Baru berjalan? Tulisan ini hendak menggali dan menyajikan mengenai unsur-unsur yang membuat kapitalisme di Indonesia pada masa Orde Baru disebut kapitalisme semu. Model-model kapitalisme seperti apa saja yang tumbuh pada masa Orde Baru. Selain itu tulisan ini hendak memberikan gambaran ringkas mengenai bisnis-bisnis yang dijalankan militer sehingga menjadikan kapitalisme di Indonesia tidak tulen.

METODE

Metode yang diterapkan dalam kajian ini adalah metode historis dengan model studi kepustakaan. Proses studi kepustakaan terdiri dari: (1) mengidentifikasi dan menemukan informasi yang relevan, (2) menganalisis temuan, dan (3) mengembangkan dan mengekspresikan ide-ide peneliti (Bungin, 2020). Metode historis dengan model studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku, jurnal, ensiklopedi, majalah, surat kabar, dan berbagai terbitan masa lalu untuk merekonstruksi sejarah (Irina, 2017). Adapun sumber-sumber kepustakaan yang digunakan dalam kajian ini antara lain buku karya Yoshihara Kunio yang berjudul *"Kapitalisme Semu Asia Tenggara"*, artikel ilmiah

karya Julianto Ibrahim berjudul "*Militer dan Kapitalisme Ersatz: Bisnis ABRI pada Masa Orde Baru*", dan beberapa seri buku terbitan majalah Tempo.

HASIL DAN DISKUSI

Kapitalisme Semu

Kapitalisme Tulen

Sebelum bicara mengenai kapitalisme semu ada baiknya kita tinjau terlebih dahulu mengenai kapitalisme yang dianggap tulen. Kapitalisme tulen yang dimaksud adalah yang muncul di Inggris pada abad ke-18. Kapitalisme yang sejati dibagi ke dalam tiga fase yakni kapitalisme perdagangan, kapitalisme industri dan kapitalisme keuangan. Gambaran mengenai kapitalisme perdagangan diperlihatkan oleh John Merriman (2010) sebagai berikut:

The development of English overseas trade allowed London to replace Antwerp as Europe's leading center of trade. London's merchant adventurers competed with Spanish and Portuguese rivals for spices and other products that fetched increasingly handsome prices at home. They traded textiles and other manufactured goods for slaves, gold, and ivory from the African and Brazilian coasts. Above all, West Indian sugar from Barbados entered the English domestic market in lucrative quantities. English merchant traded in India and Indonesia. In 1600, Queen Elisabeth chartered the East India Company with the goal of competing with Dutch traders.

Gambaran di atas memperlihatkan adanya persaingan bebas dalam perdagangan. Dalam sejarah Indonesia kita mengenal perusahaan dagang multinasional yang beroperasi di Nusantara yakni EIC dan VOC yang saling bersaing. Boleh dikatakan pemerintah Inggris dan Belanda hanya memberikan dukungan bagi perusahaan perdagangan yang berasal dari negara mereka tersebut. Sampai sebelum abad ke-19 semboyan yang dianut adalah *laissez-faire* yang berasal dari Vincent de Gournay yang maknanya adalah biarkan orang berbuat apa yang mereka sukai tanpa campur tangan pemerintah (Supardan, 2007). Perusahaan-perusahaan dagang yang berasal dari Eropa tersebut bebas melakukan usaha guna mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya.

Revolusi industri dan wilayah jajahan Inggris yang luas pada masa itu mengubah kapitalisme perdagangan menjadi kapitalisme industri. Ketika kapitalisme industri berlangsung, wilayah jajahan yang dikuasai oleh bangsa Eropa menjadi suatu keuntungan. Wilayah jajahan dapat menjadi pasar bagi produk industri negara mereka yang tidak habis di jual di dalam negeri maupun di Eropa. Mengingat sebagian negara-negara Eropa juga sudah memulai industrialisasi. Wilayah jajahan juga dapat memberikan bahan baku yang bisa mendukung industri. Pada fase ini negara sudah terlibat aktif dalam kegiatan perekonomian. Pemerintah negara-negara kapitalis terlibat dengan mengadakan politik proteksi terhadap industri dan perdagangan dalam negeri atau menjalankan politik imperialisme (Soeratman, 2012). Ernst Gombrich (2015) memberikan ilustrasi yang jelas mengenai hal ini:

(...) semua negara harus menjaga agar sedapat mungkin barang-barang buatan pabrik dapat terjual. Kalau hal itu tidak mungkin terjadi di negara sendiri, mereka harus mencobanya di luar negeri. Yang dimaksud luar negeri bukanlah Eropa. Soalnya hampir di semua tempat di Eropa sudah ada pabrik-pabrik. (...) Tiba-tiba semua negara industri mulai berlomba-lomba mencapai daerah-daerah terpencil,

bahkan semakin terpencil semakin bagus. Daerah itu tidak hanya dibutuhkan untuk menjual barang buatan pabrik, tetapi juga karena di situ sering tersedia bahan yang tidak terdapat di negara sendiri. Misalnya kapas untuk pabrik tekstil, atau minyak bumi untuk pembuatan bensin. Semakin banyak hasil bumi yang dinamakan bahan baku itu dibawa dari daerah jajahan ke Eropa, semakin banyak pula barang yang dapat dihasilkan oleh pabrik-pabrik.

Ilustrasi Ernest Gombrich di atas menyiratkan bahwa ujung dari sistem ekonomi kapitalis adalah keuntungan atau uang. Keuntungan sebesar-besarnya atau uang sebanyak-banyaknya hanya bisa didapatkan bila terdapat kebebasan. Misalnya seorang pengusaha bebas untuk melakukan produksi sebanyak-banyaknya atau seorang pedagang bebas melakukan perdagangan di manapun. Pada akhirnya nilai yang ingin dihasilkan oleh kaum kapitalis adalah nilai tukar bukan nilai guna, artinya memproduksi atau menjual barang bukan karena ia mau menggunakannya tetapi karena ingin menjualnya lagi demi keuntungan sebesar mungkin (Magnis-Suseno, 1999). Keuntungan-keuntungan yang didapatkan inilah yang akan mendukung seorang pengusaha untuk mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha lain.

Kapitalisme Semu

Hal semacam ini tidak tumbuh di Indonesia. Kapitalisme di Indonesia disebut sebagai kapitalisme semu karena persaingan bebas seperti yang terjadi di Inggris pada abad ke-18 tidak muncul. Pada awal kelahirannya kapitalisme Indonesia masih dikuasai oleh modal asing dan keturunan Tionghoa. Pengusaha yang berasal dari etnis lokal Indonesia kurang berkembang. Sebetulnya orang Indonesia keturunan Tionghoa juga merupakan warga negara Indonesia. Namun dominasinya dalam perekonomian karena kedekatannya dengan pemerintah Orde Baru membuat kapitalisme yang berkembang menjadi semu. Kapitalisme di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, disebut semu oleh para ekonom *laissez-faire* karena didominasi para pemburu rente serta bentuk kapitalisme janggal lain seperti kapitalisme birokrat dan kapitalisme konco (Kunio, 1990). Persaingan bebas yang menjadi ciri kapitalisme tidak tampak pada bentuk-bentuk ini karena pemerintah yang sangat terlibat dalam perekonomian memiliki keberpihakan pada kroninya atau kelompok tertentu.

Para kapitalis yang berusaha membangun relasi dengan pemerintah untuk tujuan mendapatkan keuntungan bisnisnya disebut dengan pemburu rente (Kunio, 1990). Situasi semacam ini tidak sehat bagi tumbuhnya kapitalisme yang organik. Sebab semakin banyaknya praktik berburu rente ini didorong atau ditoleransi oleh pemerintah dengan alasan untuk menghambat terjadinya kompetisi melalui pasar dan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi nasional (Solihah, 2016). Pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Suharto “memfasilitasi” keluarganya, kroni-kroninya, birokrat dan militer untuk terjun dalam bisnis dan perekonomian. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa kapitalisme yang tumbuh bukanlah kapitalisme tulen.

Kapitalisme Keluarga Presiden

Memang bukan kapitalisme tulen apabila yang dipermudah dalam bisnis dan perekonomian adalah keluarga presiden. Sudah bukan rahasia lagi kalau anak dan kerabat presiden memanfaatkan kuasa Presiden Suharto untuk menumpuk kekayaan. Kita mengenal bisnis dari keluarga Presiden Suharto sebagai bisnis Keluarga Cendana. Mengutip dari Tempo (2020) empat orang anak Presiden Suharto yakni Siti Hardiyanti Rukmana, Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, dan Hutomo Mandala Putra memiliki 18 proyek yang mendapatkan suntikan dana besar-besaran dari bank BUMN pada tahun 1990an. Kredit dari bank BUMN ini tidak melalui prosedur yang benar.

Putra sulung Presiden Suharto, Sigit Harjojudanto terjun dalam bisnis dengan teman-teman ayahnya. Dengan Bob Hasan ia masuk dalam bisnis kayu lapis, plat timah, pemasokan lepas pantai, dan perakitan mobil Nissan. Bersama Liem Sioe Liong alias Sudono Salim ia memasuki bisnis perkebunan, pelayaran, dan minyak goreng. Produk minyak goreng dari usaha mereka adalah Bimoli. Sigit juga berperan penting dalam Grup Hanurata yang dimudahkan pemerintah dalam mendapatkan konsesi kayu gelondongan serta proyek-proyek pemerintah. Contoh proyek pemerintah yang didapatkan Sigit adalah pengadaan persenjataan militer berupa pesawat tempur hawk 100-200 dari Inggris melalui PT Bheering Diant Pratama (Tempo, 2022). Perusahaan ini dimilikinya bersama dengan dua orang saudaranya yakni Siti Hardijanti dan Siti Hutami Endang Adiningsih. Sedangkan putra kedua presiden Bambang Trihatmodjo menjalankan bisnis bersama saudara iparnya, Indra Rukmana Kowara. Bambang memiliki grup bisnis Bimantara. Usaha Grup Bimantara antara lain pengangkutan LNG, pelayaran kargo umum, dan manufaktur petrokimia.

Putra bungsu Presiden Suharto, yang akrab dipanggil Tomy, benar-benar memanfaatkan posisi ayahnya dalam membangun jaringan bisnis. Tomy memiliki perusahaan dagang yakni PT Humpuss Intermoda yang mendapatkan hak agen tunggal untuk methanol dan purified terphthalic acid atau PTA yang merupakan produksi Pertamina tahun 1986 (Kunio, 1990). Methanol dipakai oleh produsen lem dan cat sedangkan PTA dipakai oleh produsen serat sintetis. Perusahaan yang membutuhkan bahan-bahan tersebut untuk produksinya terbilang sedikit sehingga seharusnya Pertamina bisa bertindak sebagai distributornya sekaligus. Pertamina sebetulnya tidak memerlukan PT Humpuss Intermoda sebagai perantara. Namun asal-usulnya dari Keluarga Cendana membuat arah kebijakan perusahaan BUMN sarat akan kepentingan. Tunduknya institusi pemerintah atau dalam hal ini BUMN terhadap kepentingan Keluarga Cendana digambarkan oleh Pusat Data dan Analisis Tempo (2020) dengan jelas:

Kala Soeharto berkuasa, protes sedikit saja sanggup membuat seorang pejabat dipensiunkan. Secarik memo dari sang Bapak bisa meruntuhkan segala aturan. Kalau ada yang menentang, dengan segera terbit surat “sapu jagat” bernama keputusan presiden (keppres). Berdasar penelitian Masyarakat Transparansi Indonesia, selama 32 tahun Soeharto menjabat setidaknya ada 72 keppres yang menguntungkan yayasan dan jaring bisnis keluarga.

Surat “sapu jagat” yang diterbitkan oleh Presiden Suharto tidak hanya menguntungkan anak-anaknya namun juga kroni-kroninya. Kroni-kroni Presiden Suharto juga menjalin kemitraan dengan bisnis Keluarga Cendana. Ini kemudian kita kenal sebagai kapitalisme konco.

Kapitalisme Konco

Kapitalisme konco atau *crony capitalism* merupakan usaha-usaha yang dilakukan sektor swasta yang memperoleh keuntungan sangat besar dari hubungan dekatnya dengan kepala negara (Kunio, 1990). Dua orang tokoh yang terkenal sebagai kroni Presiden Suharto adalah Liem Sioe Liong atau Sudono Salim dan Bob Hasan. Kroni-kroni Presiden Suharto sudah dikenalnya sejak menjadi Pangdam Diponegoro. Kroni-kroni Presiden Suharto yang umumnya adalah keturunan Tionghoa ini memiliki posisi dan arti yang penting pada masa Orde Baru. Pengusahaan keturunan Tionghoa yang sering disebut *cukong* ini memberikan modal, koneksi di luar Indonesia, dan kepintaran dalam berbisnis dengan tidak mengancam mitra mereka di pemerintahan (Ricklefs, 2008). *Cukong-cukong*

ini tidak akan bisa menyusun kekuatan politik yang menyaingi mitranya di pemerintahan karena terdapat sentimen kepada etnis Tionghoa. Sebaliknya Presiden atau orang-orang di pemerintahan akan memberikan lisensi pemerintah, proyek pekerjaan umum, pinjaman dari lembaga keuangan pemerintah, proteksi dari kompetisi asing, alokasi devisa, konversi lahan, konsesi kayu gelondongan, penambangan, monopoli, persetujuan pemerintah, atau apa saja yang bernilai ekonomis yang dapat diberikan pemerintah (Kunio, 1990).

Sudono Salim mengenal Presiden Suharto saat berpangkat Letkol di Semarang sekitar tahun 1949. Ketika Presiden Suharto berkuasa, ia sering memanfaatkan cukong-cukongnya, termasuk Sudono Salim untuk mendanai proyek-proyeknya. Sosok yang akan mendirikan Salim Group ini merupakan kontraktor utama proyek pemerintah dan menjadi pemasok utama minyak Indonesia. Ketika Suharto bertugas di Kostrad ia mendirikan Yayasan Dharma Putra. Yayasan ini kemudian aktif berbisnis melalui kerjasama dengan Sudono Salim setelah Suharto menjadi Presiden (Borsuk & Chng, n.d.). Sudono Salim yang merupakan kelahiran Fujian, juga membantu anak-anak Presiden Suharto dalam berbisnis. Satu contohnya adalah anak sulung presiden, Sigit Harjojudanto yang memiliki 10 persen saham Grup Sinar Mas Inti Perkasa dimana perusahaan ini bergerak dalam usaha perkebunan, produksi minyak goreng, dan pelayaran. Selain itu Sudono Salim juga dekat dengan jenderal-jenderal militer yang berada di dalam lingkaran pemerintahan Presiden Suharto. Ia diperkenalkan dengan tokoh-tokoh militer sejak masa kemerdekaan ketika mendampingi Hasan Din seorang tokoh Muhammadiyah yang merupakan mertua Bung Karno (Aning, 2005). Ia kemudian menjadi pemasok kebutuhan logistik untuk tentara Devisi Diponegoro Jawa Tengah. Tatkala Suharto menjadi presiden koneksinya dengan para militer-birokrat semakin luas. Militer-birokrat pada masa Orde Baru ini pada akhirnya menjalin kemitraan dengan para *cukong* sehingga memunculkan kapitalis birokrat.

Kapitalisme Briokrat

Permainan antara pengusaha dan militer-birokrat pemerintah bisa terjadi karena Orde Baru menjalankan model pemerintahan demokratis namun sentralistik. Pada suatu pemerintahan negara yang memiliki orientasi pada sistem pasar kepentingan bisnislah yang berada di atas kepentingan rakyat. Karena itu akan selalu terbuka ruang untuk lobi yang dilakukan para pengusaha kepada politisi atau birokrat pemerintahan (Solihah, 2016). Melalui situasi seperti demikian militer-birokrat pemerintahan pada masa Orde Baru mendapatkan peluang untuk menjadi pengusaha. Baik ketika mereka masih menjabat di pemerintahan atau ketika sudah tidak lagi memegang jabatan birokratis. Hal semacam inilah yang disebut kapitalisme birokrat. Bagi mereka yang sudah tidak menjabat di pemerintahan dapat memanfaatkan koneksinya dengan teman-temannya di pemerintahan maupun dengan pengusaha yang dikenalnya. Di Indonesia kapitalis birokrat yang terkenal adalah Ibnu Sutowo dan Bob Hasan.

Bob Hasan adalah anak angkat Jenderal Gatot Subroto yang mana membuatnya dekat dengan Suharto. Ketika Suharto menjabat sebagai presiden, ia mendapatkan kemudahan untuk menjalankan bisnisnya. Ia juga pernah menjabat sebagai menteri pada pemerintahan Presiden Suharto. Bob Hasan dikenal sebagai “raja kayu” karena eksploitasi hutan yang dilakukan terkait bisnisnya di bidang perikanan. Pada masa itu pemerintah memberikan konsensi penambangan kayu dengan biaya yang murah kepada para cukong dan ABRI (Ricklefs, 2008). Bob Hasan bersama beberapa pengusaha keturunan Tionghoa lainnya seperti Prayogo Pengestu dan Anthony Salim mendapatkan konsesi Hak Penguasaan Hutan (Hidayat, 2008).

Satu tokoh lain adalah Ibnu Sutowo yang sempat menjadi “raja” di Pertamina. Mulanya ia diberi perintah oleh Jenderal A.H Nasution untuk mengelola ladang minyak di Sumatera. Saat itu pemerintah Indonesia sedang melakukan nasionalisasi perusahaan asing. Militer memang dilibatkan dalam usaha tersebut. Ibnu menjadi direktur utama PT. Eksploitasi Tambang Minyak Sumater (EMSU) yang adalah cikal bakal Pertamina. Ia beruntung karena memimpin perusahaan minyak pada masa oil booming sehingga banyak uang yang dihasilkannya. Hingga pada masa Orde Baru Pertamina dapat menjadi sumber dana bagi pemerintahan Presiden Suharto (Aning, 2005). Melimpahnya dollar yang dihasilkan dari Pertamina membuat Ibnu Sutowo melakukan ekspansi bisnis ke berbagai bidang. Sayangnya karena adanya kebocoran dan penyelewengan dana serta jatuhnya harga minyak dunia, Pertamina terpuruk.

Bisnis Militer

Terjunnya militer dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sebetulnya sudah terjadi sejak perang kemerdekaan tahun 1945-1949. Karena terbatasnya dana setiap laskar di daerah-daerah melakukan kegiatan mencari dana dengan perdagangan dan penyelundupan. Kegiatan semacam ini terpaksa dilakukan demi membiayai operasi militer mereka. Diterapkannya dwifungsi ABRI dan masih terbatasnya anggaran dana untuk militer mendorong mereka untuk terus bergerak dalam bisnis dan perekonomian. Kegiatan bisnis dan perekonomian yang mereka jalankan digunakan untuk kebutuhan satuan militer mereka dan juga bahkan untuk memperkaya diri.

Beberapa Model Bisnis Militer

Ibnu Sutowo adalah satu contoh tokoh militer yang mengelola bisnis. Selain Ibnu banyak tokoh militer lain yang menduduki jabatan birokratis dan berbisnis. Militer Indonesia yang memonopoli kekuasaan mempertahankan sentimen terhadap keturunan Tionghoa sekaligus keberadaan mereka sebagai pengusaha. Selama hanya keturunan Tionghoa yang mendominasi kapitalisme Indonesia maka militer tidak perlu khawatir (Kunio, 1990). Dengan situasi demikian militer-birokrat dapat mencari keuntungan yang secepatnya lewat rente yang didapat. Pada pengusaha-pengusaha Tionghoa ini para militer-birokrat memberikan perlindungan dan kemudahan terhadap bisnis yang mereka jalankan.

Berburu Rente

Ibnu Sutowo adalah contoh militer-birokrat yang secara formal menjalankan perusahaan BUMN. Selain secara formal terdapat model lain yang dijalankan militer dalam melakukan kegiatan bisnis. Institusi militer mendirikan yayasan atau koperasi yang akan berkecimpung dalam bisnis. Sering juga model yang dijalankan oleh militer dalam bisnisnya adalah kerjasama dengan pengusaha swasta dimana pihak militer mendapatkan saham perusahaan secara cuma-cuma tanpa keterlibatan aktif (Misol, 2006). Dalam model ini terkadang ada keterlibatan resmi dalam manajemen namun ada juga yang sekadar menjadi “anjing penjaga” keamanan pengusaha swasta yang menjadi mitranya (Ibrahim, 2002).

Yayasan merupakan organisasi bebas pajak dan karenanya banyak didirikan oleh militer guna menjalankan bisnis. Pada mulanya yayasan militer didirikan guna memberikan pelayanan sosial dan pendidikan bagi tentara pada tahun 1960an. Ketika Presiden Suharto berkuasa, yayasan militer mendapatkan keuntungan dari hak memonopoli banyak bidang dan prioritas izin pemerintah (Misol, 2006:34). Salah satu yayasan militer yang cukup terkemuka adalah Yayasan Kartika Eka Paksi (YKEP) yang dimiliki oleh Angkatan Darat. YKEP aktif melakukan kerjasama bisnis dengan pengusaha

swasta. YKEP bekerjasama dengan Tommy Winata dengan kepemilikan bersama Bank Artha Graha, serta dengan Bambang Trihatmodjo dan Bob Hasan pada kepemilikan bersama International Timber Corporation of Indonesia atau ITCI (Tempo, 2022).

Karena secara umum orang militer tidak pandai berbisnis maka mereka bekerjasama dengan pengusaha keturunan Tionghoa. Persekutuan antara militer dan pengusaha keturunan Tionghoa ini kerap disebut dengan “Alibaba”. Militer berperan sebagai Ali yang berfungsi sebagai pihak yang berhubungan dengan masyarakat maupun pemerintah, sedangkan pengusaha keturunan Tionghoa sebagai Baba yang menjalankan usaha (Tempo, 2022). Melalui pola kerjasama semacam ini kedua belah pihak mendapatkan peran serta keuntungan masing-masing.

Dari sini dapatlah kita lihat dengan jelas bahwa para pengusaha atau kapitalis ini semu karena hanya bisa bergantung pada pemerintah. Mungkin hanya beberapa yang bisa bertahan setelah pemerintahan Orde Baru tumbang. Itu pun adalah mereka yang keturunan Tionghoa, karena pintar memanfaatkan momentum untuk membangun bisnis legal yang sehat ketika masih mendapatkan kemudahan dari pemerintah. Sementara perusahaan atau bisnis yang dijalankan militer atau keluarga presiden umumnya mengalami keterpurukan ketika krisis ekonomi melanda Indonesia. Wajar saja karena mereka menjalankan bisnis tanpa pengelolaan yang baik dan sangat bergantung pada kedekatannya dengan pemerintah.

Beberapa Contoh Bisnis Militer

Perusahaan, Yayasan atau koperasi yang dimiliki militer dalam bisnis kehutanan cukup banyak. Mereka antara lain ITCI, PT Yamaker, Supersemar, Mangadeg, YKEP, dan Kobame yang dimiliki Angkatan Darat. Sementara dari kelompok polisi memiliki Brata Bakti. Diperolehnya konsesi Hak Penguasaan Hutan menjadikan militer memasuki bisnis ekspor kayu log. Aktivitas log didasarkan lebih kepada tujuan politis daripada profesional serta kemampuan pengelolaan sehingga berdampak pada kerusakan hutan (Hidayat, 2008).

Usaha militer yang dijalankan melalui yayasan bahkan dimiliki oleh tiap matra. Yayasan Kartika Eka Paksi atau YKEP yang dimiliki Angkatan Darat memiliki sebagian saham pada PT Danayasa Arthatama. Perusahaan ini memiliki distrik pertokoan, perkantoran, hotel dan apartemen di kawasan elit SCBD atau Sudirman Central Business District (Tempo, 2022). YKEP juga memiliki bagian di Bank Artha Graha dan ITCI. Sementara Angkatan Udara memiliki Yayasan Adi Upaya (Yasau) dengan salah satu bisnisnya yakni Badan Pengelolaan Padang Golf Halim. Selain itu Yasau juga bergerak dalam kegiatan ekspor dan kontraktor.

Selain berupa yayasan, militer juga menjalankan aktivitas bisnis melalui koperasi. Angkatan Laut memiliki Inkopal (Induk Koperasi Angkatan Laut), Angkatan Udara memiliki Inkopau, Polri memiliki Inkopol. Koperasi-koperasi ini memiliki perusahaan bisnis seperti PT Yala, PT Admiral, PT Dirgantara, PT Angkasa Pura, Bank Angkasa (Tempo, 2022). Perusahaan-perusahaan ini bergerak di bidang transportasi, properti, pengiriman logistik dan perbankan.

KESIMPULAN

Orde Baru merupakan suatu konsekuensi dari masa sebelumnya yang kita kenal sebagai Orde Lama. Pada masa ketika Indonesia diperintah oleh Presiden Suharto ini, terdapat suatu perubahan dan keberlanjutan era sebelumnya. Model kapitalisme berubah karena zaman Suharto membuka Indonesia terhadap investasi asing. Yang tetap berlanjut salah satunya adalah keterlibatan militer dalam bisnis. Kombinasi kedua aspek ini

akhirnya melahirkan apa yang disebut kapitalisme semu. Dimana militer yang juga menjadi birokrat pemerintah memburu keuntungan dari posisi dan kewenangannya. Sementara pengusaha keturunan Tionghoa dimanfaatkan kepandaianya dalam berbisnis serta kecilnya ancaman mereka dari segi politik.

Modal asing yang masuk banyak dimanfaatkan oleh birokrat pemerintah dan kroni serta keluarga presiden. Sehingga pertumbuhan kapitalisme di Indonesia tidak organik seperti yang terjadi di Eropa. Kroni maupun keluarga presiden memanfaatkan peluang ini demi memperbesar jaringan bisnisnya. Namun sayangnya karena tidak dikelola dengan baik serta banyaknya penyelewengan dana, bisnis-bisnis mereka hancur. Tumbangnya pemerintahan Orde Baru dan terjadinya krisis keuangan membuat kapitalis-kapitalis yang amat bergantung pada pemerintah berguguran. Inilah bukti bahwa kapitalisme yang dibangun Orde Baru semu belaka.

DAFTAR PUSTAKA

- Aman. (2015). *Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan 1945-1998* (K. N. Nugrahini (ed.)). Ombak. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Aning, F. (2005). *100 Tokoh yang Mengubah Indonesia* (B. Siagian (ed.)). Narasi.
- Borsuk, R., & Chng, N. (n.d.). *Liem Sioe Liong's Salim Group: The Business Pillar of Suharto's Indonesia*. ISEAS Publishing.
- Bungin, B. (2020). *POST-QUALITATIVE SOCIAL RESEARCH METHODES: KUANTITATIF-KUALITATIF-MIX METHODES*. Kencana.
- Gombrich, E. (2015). *Sejarah Dunia untuk Pembaca Muda*. Marjin Kiri.
- Hidayat, H. (2008). *Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*. Yayasan Obor Indonesia.
- Ibrahim, J. (2002). Militer dan Kapitalisme Ersatz: Bisnis ABRI pada Masa Orde Baru. *Humaniora*, XIV(3).
- Irina, F. (2017). *Metode Penelitian Terapan*. Pa Rama Ilmu.
- Kunio, Y. (1990). *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*. LP3ES.
- Magnis-Suseno, F. (1999). *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Gramedia.
- Merriman, J. (2010). *A History of Modern Europe: From The Renaissance to The Present* (3rd ed.). W.W. Norton & Company, Inc.
- Misol, L. (2006). Harga Selangit: Hak Asasi Manusia Sebagai Ongkos Kegiatan Ekonomi Pihak Militer Indonesia. *Human Rights Watch*, 18(5).
- Muhaimin, J. (1997). Dwifungsi ABRI dan Demokratisasi: Menuju Penyeimbangan. *JSP*, 1(1).
- Norberg, J. (2011). *Membela Kapitalisme Global* (Arpani & S. Syahdan (trans.)). Friedrich-Naumann-Stiftung fur die Freiheit.
- Ricklefs, M. C. (2008). *A History of Modern Indonesia Since c. 1200* (4th Editio). Macmillan.
- Soeratman, D. (2012). *Sejarah Afrika*. Ombak.
- Solihah, R. (2016). Pola Relasi Bisnis dan Politik di Indonesia Masa Reformasi: Kasus Rent Seeking. *Jurnal Wacana Politik*, 1(1).
- Supardan, D. (2007). *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Bumi Aksara.
- Tempo, P. D. dan A. (2020). *Jejak Bisnis Cendana*. TEMPO Publishing.
- Tempo, P. D. dan A. (2022). *Bisnis Militer Indonesia di Era Presiden Soeharto*. TEMPO Publishing.

Vaut, S. (2014). *Buku Bacaan Sosial Demokrasi 2: Ekonomi dan Sosial Demokrasi* (I. A. Hadar (trans.)). Friedrich-Ebert-Stiftung.